

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

Febdwi Suryani, Eka Pariani

febdwi.suryani@gmail.com, Ekapariani@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Propinsi Riau. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik metode *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota di Propinsi Riau. Dengan periode pengamatan penelitian selama 3 tahun, yaitu 2013 – 2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan Program SPSS. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, uji Regresi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal). Uji regresi parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel independen (pendapatan asli daerah) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal) dan dana alokasi umum terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Besarnya pengaruh yang di timbulkan (R^2) oleh kedua variabel independen menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh sebesar 52,30% terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal.

THE INFLUENCE OF ORIGINAL REGIONAL INCOME AND GENERAL ALLOCATION FUNDS TO CAPITAL EXPENDITURE ON DISTRICTS / CITIES IN RIAU PROVINCE

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effects caused by the variable of Original Regional Income and General Allocation Fund on Capital Expenditure at Regency / City in Riau Province. Sampling technique in this research using purposive sampling technique. The population in this study consists of 10 districts and 2 cities in Riau Province. With observation period of research for 3 years, that is 2013 - 2015. The method of analysis used in this research is multiple linear regression analysis with the help of SPSS Program. From the results of research that has been done, simultaneous regression test (Test F) shows that overall has a significant significance to the dependent variable (Capital Expenditure). Partial regression test (T test) does not show significant influence to Dependent Variable (Capital Expenditure) and General Allocation Fund. Breathing Influence in effect (R^2) by both variables. Show the influence of 52,30% to working capital

Keywords: Local Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, berimplikasi pada terjadinya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Oleh karena itu salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan di daerah (Jolianis, 2016).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, APBD menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. APBD memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah .

Akhmad (2013) dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi menyatakan anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD dapat dilihat kondisi keuangan suatu Pemerintah Daerah. Pada sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan dapat dilihat tingkat kemandirian suatu daerah, dimana semakin tinggi nilainya semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Dengan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah sehingga pemerintah daerah dapat leluasa mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah melalui belanja modal. Dari sisi pengeluaran dapat dilihat kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan

ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang di gunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Belanja Modal). Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008).

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Saragih (2008), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (2009), menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Felix (2012) berpendapat bahwa Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Ketiga pendapat ini menyiratkan pentingnya

mengalokasikan belanja daerah dalam hal ini belanja modal untuk berbagai kepentingan publik .

Pemerintah pusat terus menghimbau Pemerintah Daerah (PEMDA) agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen dari total APBD, (dalam artikel situs Kemendagri pada tanggal 11 Desember 2013 dengan alamat <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen>), terlebih dari total Belanja Modal yang telah dialokasikan, sebagian untuk kepentingan lembaga atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Misalnya, bangunan kantor dan *meubelair*. Sementara persentase Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau dari tahun 2013-2015 masih banyak yang belum memenuhi himbauan tersebut.

Sementara persentase Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau dari tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Data belanja modal merupakan data alokasi anggaran pada APBD, sedangkan Total Belanja merupakan data realisasi belanja masing-masing daerah. Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa ada 5 (lima) kabupaten/ kota yang belum memenuhi himbauan tersebut yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kampar, Kota Pekanbaru dan Dumai. Pada tahun 2014 jumlah kabupaten/ kota yang belum memenuhi himbauan diatas berkurang, terdapat 2 (dua) kabupaten / kota yang belum memenuhi himbauan yaitu Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar. Sedangkan pada tahun 2015 ada 5 (lima) kabupaten/ kota yang belum memenuhi himbauan tersebut yaitu Kuantan Singingi, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Dumai, bahkan Kabupaten Kampar persentasenya sangat kecil yaitu 18 %.

Tabel 1. Data Kabupaten/Kota di Provinsi Riau TA. 2013-2015 (Dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/ Kota	Total Belanja			Belanja Modal		
	2013	2014	2015	% THD TB	% THD TB	% THD TB
Kuantan Singingi	1.257.566	1.380.114	1.502.453	24%	26%	22%
Indragiri Hulu	1.467.620	1.736.011	1.373.078	32%	33%	38%
Indragiri Hilir	1.524.027	1.714.461	1.822.697	23%	30%	33%
Pelalawan	1.345.055	1.362.139	1.684.164	41%	58%	51%
Siak	2.263.619	2.647.678	2.690.439	32%	35%	46%
Kampar	2.114.899	2.498.985	2.543.966	23%	23%	18%
Rokan Hulu	1.422.404	1.374.147	1.373.078	30%	38%	27%
Bengkalis	3.686.421	3.544.642	4.546.130	56%	61%	42%
Rokan Hilir	2.281.576	1.821.224	2.128.433	56%	73%	22%
Kepulauan Meranti	1.002.663	1.142.707	1.205.638	52%	51%	35%
Pekanbaru	1.938.889	2.342.869	2.536.344	25%	38%	51%
D u m a i	1.212.894	1.291.017	1.044.125	26%	32%	23%
Jumlah/ Total	21.517.632	22.855.994	24.450.546			

Infrastuktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan

meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja lainnya.

Dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wandira, 2012). Infrastruktur dan sarana dan prasarana merupakan belanja yang termasuk pada belanja modal.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004), melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dengan adanya transfer dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) ini, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan

untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Peneliti sebelumnya seperti Mentayani dan Rusmanto (2013) yang meneliti di Kabupaten dan Kota di Kalimantan memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Ni Luh Dina Selvia Martini, Wayan Cipta dan I Wayan Suwendra (2014) yang meneliti di daerah Kabupaten Buleleng memperoleh hasil PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Dari uraian latar belakang diatas dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka dilakukan penelitian apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Riau. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2013 -2015."

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data PAD, DAU, Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau yang meliputi 10 daerah Kabupaten dan 2 daerah Kota sehingga daerah total populasi adalah 12 daerah.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (Sugiyono, 2012). Teknik sampling yang digunakan adalah teknik full sampling, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2013 – 2015.

Variabel merupakan jumlah yang terukur yang dapat bervariasi atau mudah berubah (sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai) (Kuncoro, 2010). Untuk mempermudah pengukuran variabel penelitian, maka peneliti membutuhkan pengukuran dan

definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal, sedangkan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas digunakan model persamaan regresi berganda.

Variabel Dependen

Belanja Modal adalah untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Dalam Permendagri No. 59 tahun 2007), seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Variabel Independen

- a. Pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:
$$PAD = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$$
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan Kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanaii kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU Nomor 33 Tahun

2004). Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah.

Teknik Analisis Data

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2012) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam analisis deskriptif ini akan menjelaskan tentang analisis deskriptif masing-masing variabel dan analisis deskriptif statistik.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala multikolinearitas) atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang

sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan di antara variabel bebas. Multikorelasi dapat dilihat dari nilai VIF (*variance-inflating factor*). Jika $VIF < 10$, tingkat kolinearitas dapat ditoleransi (Sarjono dan Julianita, 2011:70).

c. Uji Autokorelasi

Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011:80), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*disturbance term*—ed) pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan adanya problem autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011:66), heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians tabel tidak sama untuk semua pengamat/observasi. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, yaitu dengan melihat *scatterplot*.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode Analisis regresi linier berganda merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel yaitu variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum) dan variabel terikat (Belanja Modal). Pengaruh antara keduanya ini akan diformulasikan ke dalam persamaan (Sugiyono, 2012).

Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

dimana:

Y = Belanja Modal

a = Konstanta

X_1 = PAD

X_2 = DAU

b_1b_2 = koefisien regresi untuk masing masing variabel X

e = Error term

Uji Model (F)

Uji simultan dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , dengan tingkat keyakinan 95%. Adapun kriteria keputusan yang di ambil sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ Maka H_a Di terima dan H_0 di tolak.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ Maka H_a Di tolak dan H_0 di terima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

a. Pengujian hipotesis Pertama.

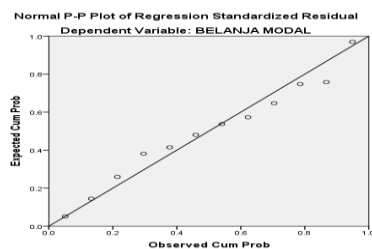
Pengujian hipotesis pertama digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variable dependen yaitu antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

- b. Pengujian hipotesis Kedua. Pengujian hipotesis kedua digunakan untuk mengetahui apakah variable independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen yaitu antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan keterangan gambar di atas, titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error		Tolerance	VIF
1	Constant)	3331468.887	931498.939	.006	
	PAD	1.601	.910	.112	.999
	DAU	-1.274	.500	.031	.999

Berdasarkan Tabel diatas tersebut di atas terlihat bahwa seluruh variabel *Variance Inflation Factors* (VIF) di bawah 10 dengan angka *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

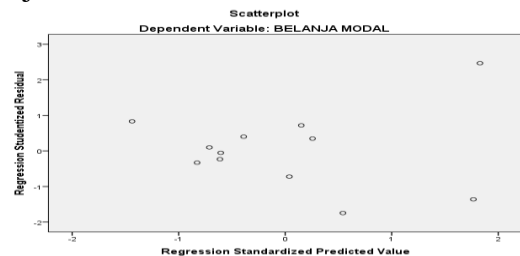
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.723 ^a	.523	.417	1093196.19641	1.702

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson tabel di atas, nilai DW untuk kedua variabel independen adalah 1,702 yang berarti nilai DW berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian ini.

Uji Heterokedasitas



Sumber : Data Olahan

Gambar 2. Hasil Uji Heterokedasitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas ini terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Dari hasil uji asumsi klasik di atas, dapat diketahui bahwa semua uji telah terpenuhi. Artinya, model regresi terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan terdistribusi normal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error			
1	(Constant)	3331468,887	931498,939	3,576	,006
	PAD	1,601	,910	1,760	,112
	DAU	-1,274	,500	-2,547	,031

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Koefisien regresi dapat diperoleh dari Tabel 4.7, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$\text{Belanja Modal} = 3.333.1468,887 + 1.601x_1 - 1.274x_2 + e$$

- a. Angka konstanta sebesar 3.333.468,887 menyatakan bahwa bila Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum nilainya 0, maka Belanja Modal nilainya adalah sebesar 3.333.468,887.
- b. Koefisien regresi untuk X1 sebesar 1.601 artinya adalah jika variabel independent lain nilainya tetap dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel X1 mengalami kenaikan 1 % maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 1.601. Nilai positif pada koefisien tersebut artinya terjadi hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal (BM). Semakin naik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Belanja Modal (BM) akan naik.
- c. Koefisien regresi untuk X2 yang negatif (-1.274) artinya adalah jika variabel independent lain nilainya tetap dan Dana Alokasi umum (DAU) mengalami penurunan sebesar 1.274. Nilai negatif pada koefisien tersebut artinya terjadi hubungan negatif antara Dana Alokasi umum (DAU) dengan Belanja Modal (BM). Semakin naik Dana Alokasi umum (DAU) maka Belanja Modal (BM) akan turun.

Uji F (Model)

Tabel 5 Hasil Uji Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression 118109338 78525.639	2	5905466939 262.819	4.941	.036 b
	Residual 107557013 14549.280	9	119507792 3838.809		
	Total 225666351 93074.918	11			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), DAU , PAD

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel di atas, diperoleh nilai uji F hitung sebesar 4.941 > F tabel sebesar 4,26 dan signifikan pada 0,036 < 0,05. Dengan demikian H0 di tolak dan Ha di terima yang berarti semua variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Modal).

Dari hasil penelitian terbukti secara simultan jika semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh maka semakin tinggi juga yang dialokasikan untuk belanja modal. Begitu juga dengan Dana Alokasi Umum, semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah maka semakin besar juga persentasi Belanja Modal daerah tersebut.

Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.723 ^a	.523	.417	1093196.1 9641	1.702

a. Predictors: (Constant), DAU , PAD

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan perhitungan nilai tersebut diatas di peroleh ini maka Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0.523. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD dan DAU memberikan pengaruh sebesar 52,30% terhadap belanja modal. Sedangkan sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian hasil penelitian hipotesis pertama

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis Pertama

Model	t	Sig.
1 (Constant)	3.576	.006

	Pendapatan Asli Daerah	1.760	.112
--	------------------------	-------	------

Dari hasil uji hipotesis pada tabel 4.10 di atas di peroleh nilai T hitung sebesar 1,760 dan T tabel sebesar 2,262 ($T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$) dan P value sebesar $112 > 0.05$. maka hasil penelitian ini menyatakan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Dari hasil penelitian semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh kepada besar dan kecilnya alokasi untuk Belanja Modal pada kabupaten /kota di Provinsi Riau.

Pengujian hasil penelitian hipotesis kedua

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis Kedua

Model		t	Sig.
1	(Constant)	3.576	.006
	Dana Alokasi Umum	-2.547	.031

Dari hasil uji hipotesis pada tabel 4.11 di atas di peroleh nilai Thitung sebesar $- 2.547$ dan Ttabel sebesar $- 2,262$ ($Thitung > Ttabel$) dan Pvalue sebesar $0.031 < 0.05$. maka hasil penelitian ini menyatakan maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Dari hasil penelitian semakin tinggi Dana Alokasi Umum berpengaruh kepada besar dan kecilnya alokasi untuk Belanja Modal pada kabupaten /kota di Provinsi Riau.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil

daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 2007). Seperti yang di ketahui bahwa Belanja modal termasuk dari bagian kelompok belanja langsung merupakan bagian dari belanja daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Namun hal itu belum tentu sepenuhnya terjadi kenaikan pada belanja modal karena belanja modal hanya bagian dari kelompok belanja langsung dari belanja daerah.

Hasil penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah bahwa tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arwati & Hadiati (2013), Sugiardi & Supadmi (2014), Martini & Suwendra (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) serta Aditiya (2017) yang menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan pemahaman bahwa peningkatan atau penurunan tingkat Pendapatan Asli Daerah tidak atau belum tentu terjadi peningkatan dalam belanja modal pemerintah Kota/ Kabupaten di Propinsi Riau.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Pernyataan Abdul Halim (2008) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi

ketimpangan horizontal yang bertujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semakin tinggi pula Belanja Modal. Hasil penelitian pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah bahwa terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ricardo (2012), Sugiardi & Supadmi (2014), Martini & Suwendra (2014) serta penelitian Adyatma (2015) menyatakan ada hubungan yang positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan kelompok dari belanja langsung dari pada Belanja Daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan: a) Dari Hasil uji hipotesis pertama maka hasil penelitian ini menyatakan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ kota di Propinsi Riau. b) Dari hasil uji hipotesis kedua maka hasil penelitian ini menyatakan maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten/ kota di Propinsi Riau.

Saran

a. Bagi pemerintah daerah agar dapat berusaha untuk mengoptimalkan tingkat pendapatan asli daerah misalnya dengan membentuk

peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah secara jelas dan tegas ataupun dengan memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah untuk mengelola/bekerjasama dengan pihak -pihak yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerah , sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin dan hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah akan semakin meningkat dan tingkat ketergantungan terhadap transfer dari pusat juga semakin berkurang sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Propinsi Riau, dapat lebih memprioritaskan untuk mengalokasikan kepada Belanja Modal dari setiap Penerimaan Asli Daerah. Karena, Belanja Modal merupakan pengeluaran atau belanja yang dilakukan pemda yang bersifat produktif dan jangka panjang dibandingkan Belanja Rutin yang sifatnya konsumtif dan jangka pendek.

b. Hendaknya penelitian selanjutnya menggunakan variabel yang lebih lengkap, agar lebih dapat melakukan generalisasi atas hasil penelitian. Misalnya dengan menambah rentang waktu yang diteliti dan memperluas obyek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi. Variabel yang bisa ditambahkan antara lain Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati Dini, Novita Hadiati. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (Semantik 2013)*. ISBN: 979-26-0266-6.
- Felix, Olurankinse. 2012. *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), pp: 1-6.
- Halim, Abdul. 2008. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- Jolianis. 2016. *Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening*, *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.4, No. 2, Hal. 34-57.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. UNDIP. Semarang.
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mentayani, Rusmanto. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dan Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten di Pulau Kalimantan*. *Jurnal InFestasi* Vol. 9 No. 2 Desember 2013 91-102.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59. 2007. *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riduawan & Kuncoro, 2010, *Metode Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Edisi Kelima. UUP STIM YKPN. Yogyakarta
- Saragih, Juli, Panglima, 2008, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita, 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*. Salemba Empat. Jakarta
- Stine, W. Oates, 2009, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change*. Vol 49. Hal: 1- 21.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung.
- Sugiarthi Rini, Supadmi Ni Luh. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 (2014): 477-495 ISSN: 2302-8556 .

UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.*

UU RI.2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.* ISSN 2252-6765.